

ANALISIS INTERAKSI KEBIJAKAN MONETER DAN FISKAL DALAM MENINGKATKAN STABILITAS EKONOMI

Trisnawati¹, Alya Natantry², Muhammad Akhdan Bahy³, Pani Akhiruddin Siregar⁴
trisnawati031117@gmail.com¹, alyanatantryya0408@gmail.com², akhdan.bahy.da1@gmail.com³,
paniakhiruddin@umsu.ac.id⁴

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis interaksi kebijakan fiskal dan moneter di Indonesia. Permasalahan utama interaksi kebijakan fiskal dan moneter terletak pada terjadinya trade-off antara pencapaian stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek. Keseimbangan pendapatan dan tingkat bunga baik di pasar uang maupun pasar barang dalam meningkatkan kinerja perekonomian yang di tunjukan melalui beberapa indikator makro ekonomi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yaitu dengan menggunakan kajian Pustaka dengan mengambil referensi dari beberapa e-book serta jurnal yang di dapatkan dari sumber website atau internet. Dengan menganalisis sejumlah artikel ilmiah, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih baik mengenai hubungan antara kebijakan fiskal dan moneter dan stabilitas ekonomi.

Kata Kunci: Interaksi kebijakan fiskal dan moneter, Trade-off stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi, Keseimbangan pendapatan dan tingkat bunga.

PENDAHULUAN

Kebijakan selalu mencakup struktur yang mendua. Di satu sisi kebijakan mempunyai dimensi instrumental dalam menghasilkan keputusan, program dan hasil lainnya dengan nilai-nilai yang diyakini oleh para aktor mengambil keputusan. Kebijakan fiskal dan kebijakan ekonomi moneter mempunyai peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi sebagai penyeimbang permintaan agregat dan penawaran agregat. Walaupun berbeda fungsi, kedua kebijakan tersebut dapat digunakan secara simultan untuk mencapai stabilitas harga dan neraca pembayaran.

Kebijakan fiskal dan kebijakan ekonomi moneter bagian integral dari kebijakan makro ekonomi yang memiliki target yang harus di capai baik dalam jangka waktu pendek maupun jangka waktu Panjang. Sering terjadi perdebatan antara kebijakan fiskal dan moneter. Di satu sisi, kebijakan moneter diarahkan untuk mencapai target menjaga stabilitas harga, sementara di sisi lain kebijakan fiskal ditetapkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Hal ini kemudian munculnya trade-off yang mana terlebih dahulu apakah stabilitas harga atau pertumbuhan ekonomi terutama dalam jangka pendek. Pengelolaan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter dengan koordinasi yang baik akan memberikan hasil yang baik akan memberikan hasil yang positif dalam perekonomian Indonesia.

Perkembangan penelitian tentang kebijakan fiskal dan moneter dan dampaknya terhadap stabilitas ekonomi sangat penting dalam membentuk pemahaman kita tentang dinamika kompleks dari kebijakan-kebijakan ini implikasinya terhadap Kesehatan ekonomi secara keseluruhan. Selama bertahun-tahun, penelitian dibidang ini telah berkembang dan meluas, didorong oleh kemajuan dalam ekonomi, munculnya sumber-sumber dari data baru, dan kebutuhan akan pembuatan kebijakan berbasis bukti.

Kebijakan fiskal dan moneter melainkan pera penting dalam membentuk stabilitas ekonomi suatu negara. Kebijakan fiskal melibatkan Tindakan pemerintah yang berkaitan dengan perpajakan, pengeluaran publik, dan keputusan anggaran, sedangkan kebijakan

moneter berfokus pada Tindakan bank sentral untuk mengatur jumlah uang beredar, suku bunga, dan nilai tukar. Efektivitas kebijakan-kebijakan ini dalam menjaga stabilitas ekonomi telah menjadi subjek penelitian dan perdebatan yang luas. Stabilitas ekonomi mencakup beberapa faktor kunci termasuk, inflasi rendah pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, tingkat pengangguran yang rendah, dan stabilitas system keuangan. Mencapai dan mempertahankan stabilitas ekonomi sangat penting untuk menumbuhkan kepercayaan investor, mendorong pembangunan berkelanjutan, dan memastikan kesejahteraan individu dan bisnis.

METODOLOGI

Proses pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan kumpulan data yang komprehensif dari artikel-artikel ilmiah yang berkaitan dengan kebijakan moneter dan fiskal serta stabilitas ekonomi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang menjelaskan fenomena dan data serta penelitian terdahulu, kemudian menarik kesimpulan dari persoalan yang ada. Tujuan penelitian menggunakan metode ini adalah karena metode penelitian kualitatif lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam mengenai suatu masalah yang diambil dengan lebih akurat dan jelas berdasarkan dengan fakta. Kemudian penelitian ini menggunakan literatur primer yang bersumber dari jurnal, artikel, dan laporan penelitian mengenai pokok bahsa yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan moneter dan fiskal merupakan dua instrumen penting dalam mengatur perekonomian suatu negara. Keduanya memiliki peran yang berbeda namun saling terkait dalam mengendalikan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas keuangan. Kebijakan moneter mengacu pada Tindakan yang diambil oleh bank sentral suatu negara untuk mengatur jumlah uang beredar dan suku bunga guna mencapai tujuan-tujuan ekonomi tertentu. Tujuan utama kebijakan moneter adalah menjaga stabilitas harga (mengendalikan inflasi) dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang seimbang. Kebijakan fiskal di sisi lain, merujuk pada Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah terkait pengeluaran dan pendapatan publik. Kebijakan fiskal bertujuan untuk mengendalikan aktivitas ekonomi melalui perubahan dalam anggaran belanja, pajak, dan subsidi.

Asal Mula Kebijakan Moneter Dan Fiskal

Kebijakan moneter, terutama yang dilakukan oleh bank sentral, bertujuan untuk mengatur jumlah uang beredar, suku bunga, dan nilai tukar untuk mencapai stabilitas ekonomi makro. Literatur mengenai kebijakan moneter dan stabilitas ekonomi berfokus pada dampak dari penyesuaian suku bunga terhadap inflasi, ketenaga kerjaan, dan pertumbuhan ekonomi. Para peneliti juga telah menyelidiki efektivitas alat kebijakan moneter non-konvensional, seperti pelonggaran kuantitatif, panduan ke depan, dan suku bunga negatif, dalam menstabilkan ekonomi selama periode krisis keuangan. Memahami mekanisme transmisi dan keterbatasan kebijakan moneter sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi.

Kebijakan fiskal mengacu pada penggunaan perpajakan, pengeluaran publik, dan pinjaman oleh pemerintah untuk mempengaruhi kondisi ekonomi dan mencapai hasil yang diinginkan. Banyak penelitian telah meneliti hubungan antara kebijakan fiskal dan stabilitas ekonomi. Para peneliti telah mengeksplorasi dampak pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi, dampak perpajakan terhadap investasi dan konsumsi, dan implikasi dari defisit atau surplus anggaran terhadap inflasi dan utang publik. Studi-studi ini memberikan wawasan tentang peran kebijakan fiskal dalam mendorong stabilitas ekonomi

dan potensi trade-off dan keterbatasannya.

Interaksi antara kebijakan fiskal dan moneter merupakan area penelitian yang penting dalam memahami stabilitas ekonomi. Tindakan kebijakan yang terkoordinasi antara otoritas fiskal dan moneter dapat bermanfaat dalam mencapai tujuan bersama. Namun, konflik dan ketidakonsistenan antara kebijakan-kebijakan ini juga dapat terjadi, yang berpotensi menyebabkan tekanan inflasi, fluktuasi nilai tukar, atau efek crowding out. Para peneliti telah mengkaji mekanisme koordinasi, aturan kebijakan, dan kerangka kerja institusional yang diperlukan untuk memastikan sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter demi tercapainya stabilitas ekonomi.

Kesadaran terhadap pengaruh pengeluaran dan penerimaan pemerintah belum lama muncul dalam dunia ilmu pengetahuan. Maka timbullah gagasan dengan sengaja untuk mengubah-ubah pengeluaran dan penerimaan pemerintah guna mencapai kesetabilan ekonomi. Sebelum tahun 1920-an, pengeluaran pemerintah hanya dianggap sebagai alat untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah dan dinilai atas dasar asas manfaat langsung yang dapat ditimbulkannya tanpa melihat pengaruhnya terhadap pendapatan nasional. Sebaliknya Pajak hanya sebagai sumber pembiayaan pengeluaran Negara dan belum diketahui pengaruhnya terhadap pendapatan nasional. Akibatnya dalam masa depresi di mana penerimaan pemerintah menurun, maka pengeluaran pemerintah harus dikurangi pula. Hal ini berpengaruh terhadap pendapatan nasional serta semakin lesunya perekonomian.

Pada masa depresi pada tahun 1930-an teori kebijakan fiskal pertama kali mulai muncul karena tidak mempunyai kebijakan moneter dalam menanggulangi depresi itu. Kebijakan moneter berguna untuk merangsang kegiatan individu atau swasta. Pada saat terjadi pengangguran harga-harga turun deoresi, maka oleh kebijakan moneter dengan cara menambah jumlah uang yang beredar lewat politik diskonto dengan menurunkan tingkat bunga atau dengan politik pasar terbuka, dimana pemerintah membeli surat berharga.

Konfigurasi kebijakan fiskal dan moneter di Indonesia

Konfigurasi kebijakan fiskal dan moneter di Indonesia adalah sebuah system yang mengatur bagaimana pemerintah mengelola wilayah negara melalui pengelolaan anggaran dan moneter. Kebijakan ini pun meliputi pengelolaan pendapatan, pengeluaran, dan pemasukan negara, serta pengelolaan biaya dan kewangan. Konfigurasi kebijakan fiskal dan moneter di Indonesia sangat penting untuk memperkuat perekonomian negara dan mencapai tujuan Pembangunan ekonomi. Untuk mencapai tujuan Pembangunan ekonomi, pemerintah Indonesia harus melakukan rekayasa kebijakan fiskal dan moneter yang efektif. Hal ini dapat dilakukan rekayasa melalui pengelolaan biaya dan kewangan yang disusun secara teratur dan transparan. Pemerintah juga perlu mengembangkan program-program Pembangunan ekonomi yang efektif, seperti pengembangan infrastruktur, pengembangan industri, pengembangan Pendidikan dan Kesehatan. Selain itu, pemerintah juga harus mengatur system pajak yang efisien dan transparan, pajak harus disusun secara teratur dan transparan, sehingga tidak ada kesalahan pajak dan tidak ada penggunaan pajak yang tidak sesuai. Pemerintah juga harus mengembangkan system pengelolaan pajak yang efisiensi dan transparan, sehingga pajak dapat dikumpulkan dengan efisien.

Konfigurasi kebijakan fiskal dan moneter di Indonesia juga mencakup pengelolaan moneter. Pemerintah harus mengatur system moneter yang efektif dan transparan, sehingga tidak ada inflasi yang tinggi. Pemerintah juga harus mengatur system moneter yang dapat membantu Pembangunan ekonomi, seperti pengembangan system bank dan system pemasaran. Konfigurasi kebijakan fiskal dan moneter di Indonesia sangat penting untuk mencapai tujuan Pembangunan ekonomi. Pemerintah harus mengelola wilayah negara dengan efektif dan transparan, sehingga dapat memperkuat ekonomi negara dan mencapai tujuan Pembangunan ekonomi.

Kaitan antara Kebijakan Fiska Dan Kebijakan Moneter

Mula mula kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah dalam mengurangi ketidak stabilan ekonomi adalah dengan kebijakan moneter yaitu dengan pengetatan jumlah kredit (tight money policy) atau dengan memperlonggar perkreditan (easy money policy) yang diberikan oleh bank-bank umum. Untuk itu biasanya bank sentral sangat berperan dalam mempengaruhi jumlah uang beredar dengan cara mengubah-ubah tingkat bunga dan deking (legal reserve requirement) ataupun menjual atau membeli surat berharga. Dalam masa defresi bank Bank Sentral menambah jumlah uang beredar dengan politik pasar terbuka yaitu dengan membeli obligasi Negara, yang selanjutnya dapat menekan tingkat bunga dan memperbesar deking bank-bank umum dapat memperluas pemberian kreditnya lagi. Pada tahun 1930-an terbukti bahwa kebijakan moneter saja tidak dapat mengatasi depresi sebab tingkat bunga yang sudah begitu rendah ternyata tidak dapat mendorong timbulnya investasi, karena orang lebih senang menyimpan uang tunai.

Dengan kata lain permintaan akan uang tunai untuk sekedar menganggur (idle balances) menjadi elastis sempurna pada tingkat bunga yang rendah. Dan Pertumbuhan PDB suatu negara akan tumbuh baik ketika stabilitas moneter terjaga. Stabilitas menjadi kata kunci pertama dalam konsep Trilogi Pembangunan di Indonesia. Presiden Soeharto, dalam pidato RAPBN 1977-1978, menegaskan, GBHN mengamanatkan bahwa pembangun harus mengarah pada kemajuan, kesejahteraan sosial. Untuk menjamin tercapainya sasaran tersebut, kebijakan bertumpu pada trilogi pembangunan, yaitu: stabilitas, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan pembangunan. "Di atas landasan stabilitas, kita terus mengusahakan pertumbuhan di segala bidang, khususnya pertumbuhan ekonomi. Dengan ekonomi yang tumbuh, dengan keuangan negara yang lebih sehat, kita akan memiliki lebih banyak alternatif kebijakan pembangunan," tegas Soeharto (1977).

Pemerintah Soeharto, kata Widjojonitisastro, menerapkan demokrasi ekonomi yang tidak memberi tempat pada: (1) sistem persaingan bebas (free fight liberalism), sistem etatisme dimana aparat negara sangat dominan, dan gejala monopoli yang merugikan, baik monopoli negara maupun swasta. Presiden Soeharto dinilai berhasil mewujudkan stabilitas ekonomi yang ditandai dengan stabilnya harga kebutuhan pokok. Pada masa orde reformasi, kebijakan moneter dan fiskal dimonitor oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang terdiri dari Gubernur BI, Menteri Keuangan, Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Di bidang moneter, Bank Indonesia (BI) memfokuskan kebijakan suku bunga dan nilai tukar untuk memperkuat stabilitas eksternal perekonomian, khususnya untuk mengendalikan defisit transaksi berjalan dalam batas yang aman dan mempertahankan daya tarik aset keuangan domestik. Selama triwulan I 2019, BI mempertahankan suku bunga acuan (BI7DRR) sebesar 6,00%. Bersamaan dengan itu, BI juga menempuh berbagai kebijakan yang lebih akomodatif untuk mendorong permintaan domestik antara lain melalui; pertama, strategi operasi moneter untuk meningkatkan ketersediaan likuiditas di pasar melalui transaksi term-repo secara regular dan terjadwal, disamping FX Swap. Kedua, memperkuat kebijakan makroprudensial yang akomodatif dengan menaikkan kisaran batasan Rasio Intermediasi Makroprudensial menjadi 84-94%. Ketiga, mengakselerasi pendalaman pasar keuangan melalui penguatan market conduct dan penerbitan ketentuan pelaksanaan instrumen derivatif suku bunga Rupiah. Keempat, memperkuat kebijakan sistem pembayaran dengan memperluas elektro.

Di bidang fiskal, kinerja APBN secara umum menunjukkan tren positif, baik di sisi pendapatan maupun belanja negara, yang akan mendukung pencapaian target pembangunan 2019. Pemerintah berkomitmen untuk terus mengelola keuangan negara dengan pruden dan

transparan. Dengan APBN yang kredibel, diharapkan Indonesia mampu mempertahankan momentum pertumbuhan, termasuk dalam mengantisipasi kondisi perekonomian global yang masih diliputi perlambatan.

OJK memandang bahwa SSK masih terjaga dengan baik yang didukung oleh tingkat permodalan dan likuiditas Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang memadai. Kinerja intermediasi LJK juga tumbuh positif dengan kat risiko yang manageable. OJK mendukung peran aktif dari sektor jasa keuangan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, antara lain dengan memperluas pendalaman pasar, meningkatkan kapasitas pelaku di industri keuangan, dan mengembangkan program pembiayaan sektor jasa keuangan yang berkelanjutan. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menilai tren kenaikan suku bunga simpanan secara umum sudah melandai dan stabil, sejalan dengan membaiknya kondisi likuiditas perbankan. Selanjutnya LPS juga melakukan pemantauan dari sisi coverage penjaminan baik nominal dan rekening di mana data terakhir dinilai masih memadai untuk mendukung kepercayaan nasabah kepada sistem perbankan.

Pengertian stabilitas ekonomi

Stabilitas dalam ilmu ekonomi diartikan sebagai suatu keadaan dalam perekonomian yang sedang berjalan sesuai dengan rencana yang telah direncanakan artinya seluruh kegiatan perekonomian berjalan sesuai harapan, dapat dikendalikan dan juga berkesinambungan antara satu sama lain. Hal ini diartikan bahwa pertumbuhan arus mata uang yang sedang beredar dalam keadaan seimbang dengan arah pertumbuhan arus barang dan jasa yang telah disediakan.

Stabilitas perekonomian adalah prasyarat dasar untuk tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan yang tinggi dan peningkatan kualitas pertumbuhan. Stabilitas perekonomian sangat penting karena dapat memberikan kepastian berusaha bagi para pelaku ekonomi. Dalam penelitian ini stabilitas ekonomi diinterpretasikan oleh inflasi, sebab inflasi merupakan bagian dari makroekonomi. Menurut para ahli ekonomi ada beberapa indikator makroekonomi yaitu pendapatan nasional (PDB dan PNB), tingkat pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan tingkat pengangguran, inflasi, dan neraca pembayaran. Salah satu tujuan dari kebijakan makroekonomi adalah menghindari masalah inflasi, sebab inflasi menimbulkan beberapa akibat buruk bagi kesejahteraan masyarakat dan kegiatan perekonomian. Adakalanya inflasi berlaku sebagai akibat ketidakstabilan politik dan ekonomi suatu Negara. Dalam kondisi seperti ini biasanya inflasi tinggi dan sulit untuk dikendalikan (Sukirno:2008).

Kebijakan fiskal dalam meningkatkan stabilitas ekonomi

Keberadaan kebijakan pemerintah dalam negara merupakan sebuah landasan atau dasar dari seluruh kegiatan ekonomi yang akan atau yang telah dilakukan oleh pihak pemerintah baik itu dalam lingkup ekonomi kecil atau ekonomi besar. Salah satu kebijakan yang dimaksud dalam hal ini adalah kebijakan fiskal yang dimana fiskal diterapkan dalam perekonomian untuk resesi ekonomi baik itu yang sedang terjadi atau pun yang akan terjadi. Dalam hal menghadapi resesi ekonomi maka peran fiskal dalam hal ini akan sangat berpengaruh terhadap perekonomian negara dalam hal merubah system Pembangunan negara secara besar-besaran.

Kebijakan Moneter dalam meningkatkan stabilitas ekonomi

Kebijakan moneter akan berkaitan dengan mata uang atau uang yang beredar dalam negara istilahnya kebijakan moneter akan selalu berkaitan dengan suku bunga jika itu dalam moneter konvensional. Akan tetapi jika dalam moneter islam maka moneter akan berkaitan dengan dinar, emas, dan perak. Tetapi dalam ekonomi kontemporer atau ekonomi modern saat ini ketiga instrument tersebut telah diganti dengan mata uang akan tetapi disertai dengan

suku bunga. Dalam hal ini besarnya volume impor uang dan komoditas akan bergantung kepada berapa volume komoditas ekspor. Ketika permintaan uang naik, maka dilakukan kegiatan impor uang. Sedangkan Ketika permintaan uang turun, maka uang akan di impor.

KESIMPULAN

Sebagai kesimpulan, analisis interaksi kebijakan ekonomi moneter dan fiskal dalam meningkatkan stabilitas ekonomi telah memberikan wawasan yang mengenai konsep-konsep utama, tema-tema penelitian, dan area-area yang menarik di bidang ini. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi adalah beberapa peraturan atau Batasan-batasan di bidang ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Tujuan di buatnya kebijakan ekonomi adalah untuk meningkatkan taraf hidup atau Tingkat kesejahteraan Masyarakat. Kebijakan ekonomi bisa dibagi menjadi dua macam kebijakan yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Pentingnya kebijakan moneter dalam mempertahankan stabilitas ekonomi. Kebijakan moneter sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi karna kebijakan ini memungkinkan bank sentral untuk mengendalikan tingkat suku bunga dan pasokan uang di pasar keuangan. Keduanya saling melengkapi dalam mencapai tujuan-tujuan ekonomi yang diinginkan, seperti menjaga stabilitas harga, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhyar, M., Syahnur, S., & Asmawati, A. (2019). Analisis interaksi kebijakan fiskal dan moneter terhadap perekonomian Indonesia. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam (Darussalam Journal of Economic Perspec*, 5(2), 112-123.
- Hasan, M., & Azis, M. (2018). *Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat: Strategi Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Lokal*.
- <https://umsu.ac.id/artikel/kebijakan-moneter-dan-fiskal-mengupas-pengertian-tujuan-jenis-perbedaan-dan-contohnya-di-indonesia/>
- Junaedi, D., Supriyatna, R. K., & Evinovita, E. (2020). Pengaruh Fiskal Moneter terhadap Perekonomian Indonesia. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 2(2), 196-219.
- Khusen, M. S. *KEBIJAKAN EKONOMI (MONETER & FISKAL)*.
- Malik, I., & IP, S. (2018). *KEBIJAKAN FISKAL UNTUK STABILITAS PEREKONOMIAN INDONESIA*.
- Meiyenti, I., Agustina, I., Primadhany, E. F., Tumija, T., & Nalien, E. M. (2023). Menganalisis Kebijakan Fiskal dan Moneter: Dampaknya terhadap Stabilitas Ekonomi. *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan West Science*, 1(03), 186-195.
- Nangarumba, M. (2016). Analisis Pengaruh Kebijakan Moneter, Kebijakan Fiskal, dan Penyaluran Kredit Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur Tahun 2006-2016. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 8(2), 114-130.
- Saputro, D. E. (2013). *Kontribusi Ketersediaan Pangan Terhadap Stabilitas Ekonomi Di Indonesia (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta)*.
- Sugiatni, E. (2022). *STABILITAS EKONOMI DALAM EKONOMI PERSPEKTIF ISLAM*.
- Zulkifli, Z., & Fahrika, A. I. (2020). *Perekonomian Indonesia Sejarah Dan Perkembangannya*.